

ALTRUISME KOMERSIAL **Wahyudi Kumorotomo**

Dalam tahap pasca bencana gempa di Jogja dan Klaten, program rekonstruksi dan rehabilitasi adalah suatu keniscayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa gempa tektonik kali ini merupakan sebuah tragedi yang menyisakan kegetiran dan kesedihan. Tetapi betapapun warga di Kabupaten Bantul, Prambanan, Klaten dan sekitarnya harus segera bangkit untuk membangun kembali secara bermartabat. Sungguh mengharukan bahwa simpati dan uluran bantuan dari berbagai pihak, baik secara individual maupun atas-nama lembaga telah mengalir sejak terjadinya gempa pada hari Sabtu kelabu itu. Namun hendaknya tetap disadari bahwa bantuan itu tidak akan datang untuk selamanya. Terlebih lagi jika diingat bahwa tidak semua bantuan itu datang tanpa maksud-maksud tertentu. Tanpa mengurangi rasa hormat dan salut kepada pihak-pihak yang secara ikhlas telah membantu, ternyata masih banyak bantuan yang dilandasi oleh "altruisme komersial".

Menyaksikan cara-cara alokasi bantuan berupa tindakan medis, tenda darurat, logistik atau pakaian di beberapa kawasan paling parah di kecamatan Jetis, Sewon, Pleret, dan Piyungan, terlihat bahwa begitu banyak pemberian bantuan itu disertai dengan kepentingan politis atau kepentingan komersial. Berdasarkan kategorisasi umum, lembaga pemberi bantuan itu dapat digolongkan ke dalam enam jenis, yaitu: pemerintah, militer, parpol, perusahaan swasta, LSM, dan perguruan tinggi. Namun di lapangan bisa dijumpai begitu banyak "bendera" yang menyertai penyerahan bantuan. Semangat membawa bendera inilah yang membuat cara-cara pemberian bantuan itu terkadang terasa menggelikan. Para pejabat yang datang meminta agar penyerahan bantuan disertai dengan upacara yang melibatkan banyak warga dengan disorot kamera TV, wawancara dengan wartawan, ditulis laporannya, dsb. Beberapa kader partai seolah berlomba-lomba untuk memanfaatkan tragedi ini bagi kampanye partainya dengan berbagai atribut yang mencolok. Sebagian dari LSM juga memasang spanduk, stiker atau pelbagai atribut yang sangat mencolok untuk menandai kehadiran mereka. Sebuah perusahaan farmasi yang menyerahkan tenda darurat meminta bahwa pemasangannya harus dekat dengan jalan utama agar terlihat oleh orang banyak, tidak peduli bahwa di tempat-tempat yang belum terjangkau alat transportasi masih banyak warga yang belum memperoleh tenda. Sebuah perusahaan makanan cepat saji meminta agar relawan yang menyerahkan memakai atribut lengkap perusahaan tersebut dan mengatakan kepada warga dari mana asalnya bantuan tersebut. Sementara itu tidak kurang sekian banyak relawan yang datang dengan kaos oblong baru, co-card dan pelbagai tanda pengenal yang berwarna-warni.

Sesungguhnya tidak ada masalah kalau pelbagai atribut relawan, lembaga dan perusahaan itu semata-mata dimaksudkan agar identitas mereka dalam bekerja di lapangan jelas sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga. Beberapa kali kasus pencurian dan penjarahan bantuan memang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya relawan dan bahkan ada penjahat yang menggunakan mobil box bantuan dan ambulans. Tetapi kalau atribut-atribut itu

disertai dengan kepentingan politis dan komersial, masyarakat hendaknya waspada dan hati-hati. Kata-kata “altruisme komersial” di sini mungkin kurang pas digunakan sebagai judul tulisan. Altruisme mengandung arti semangat untuk membantu karena peduli dengan penderitaan sesama manusia. Sedangkan komersial mengandung arti semangat mencari untung atau memburu laba. Kedua istilah ini semestinya mengandung konotasi yang jelas berbeda. Tetapi melihat apa yang dilakukan oleh sebagian institusi dalam pengalangan bantuan korban gempa, dapat segera dirasakan bahwa masih cukup banyak kepentingan politis maupun komersial yang menyertai semangat altruisme yang seharusnya dimaksudkan semata-mata karena memenuhi rasa kemanusiaan. Setelah tanggap darurat usai dan liputan media mulai beralih ke masalah lain, akan segera terlihat siapa saja atau lembaga mana yang benar-benar menunjukkan komitmen kemanusiaan dan mana yang hanya sekadar memanfaatkan peristiwa bencana ini bagi kepentingan yang sempit.

Musibah dan bencana sudah beberapa kali dialami oleh bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, semestinya warga Jogja dan sekitarnya bisa belajar dari pengalaman penanganan bencana di Aceh, Nias, Jember, Papua, dan wilayah-wilayah lainnya. Dalam situasi darurat, seringkali masih banyak yang begitu mudah menyalahkan pihak lain, entah itu pemerintah, lembaga sosial, LSM, atau tim relawan, karena kelambanan penanganan, karena kurang meratanya distribusi bantuan, dan sebagainya. Tetapi jarang yang segera menanggapi dengan pemecahan masalah secara sistematis di lapangan, dengan memberikan solusi dan bukan sekadar menyalahkan. Kritik yang keras sudah banyak dilontarkan mengenai lemahnya koordinasi di lapangan. Tetapi yang lebih diperlukan sesungguhnya adalah solusi tentang bagaimana mekanisme yang lebih baik diantara Bakornas di tingkat nasional, Satkorlak di tingkat provinsi, Satlak di tingkat kabupaten, dan Posko di kecamatan dan desa-desa. Sudah saatnya diciptakan sistem manajemen bencana yang dapat disebut sebagai *double-track public governance*, sebuah sistem yang dapat bekerja pada saat normal dan sekaligus segera bisa berfungsi pada saat terjadi bencana. Inilah yang perlu dipikirkan segera agar masalah-masalah koordinasi dapat dipecahkan untuk menghadapi kondisi darurat terutama di daerah-daerah yang rawan bencana.

Belajar dari pengalaman penanganan pasca bencana di Aceh, kita dapat melihat bahwa potensi akan adanya altruisme komersial dan bahkan penyalahgunaan bantuan itu terdapat pada semua jenis lembaga, apakah itu pemerintah, swasta, atau LSM. Sorotan dan kritik masih berlanjut hingga kini mengenai alokasi dana oleh BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Aceh yang sebagian kurang jelas pertanggungjawabannya. Sementara itu, kini merebak berita bahwa sebagian dari dana yang disalurkan oleh LSM internasional ternyata menyeleweng dan tidak sampai kepada sasaran. Berita tidak sedap itu ternyata bukan hanya menyangkut beberapa LSM kecil tetapi juga mereka yang sudah punya reputasi internasional seperti OXFAM dari Canada, Save the Children dari AS atau FES dari Jerman. Yang terjadi mungkin bukan termasuk korupsi secara langsung. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mempercayai seorang *field manager* LSM yang memperoleh gaji hingga Rp 1,2

milyar setahun, jauh lebih tinggi ketimbang gaji di negara mereka sendiri? Hal-hal seperti inilah yang perlu kita waspadai karena proses rekonstruksi pasca bencana di Jogja baru akan dimulai.

Betapapun, rekonstruksi nantinya harus benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Jogja sendiri. Warga Jogja hendaknya memahami bahwa di balik musibah gempa ini justru terdapat peluang emas untuk membuktikan citra masyarakat Jogja sebagai masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Jika kebutuhan pokok selepas tanggap darurat terpenuhi, bukan saatnya lagi untuk senantiasa menengadahkan tangan. Proses rekonstruksi hendaknya dilakukan secara berdaulat dan mandiri. Marilah kita kembali bekerja. Bangkitlah Jogjaku!

Penulis adalah dosen Fisipol UGM, anggota Forum Bersama untuk Informasi Penanganan Bencana.